

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Karena hampir semua aspek kehidupan bergantung pada uang, ekonomi sangat penting di era globalisasi saat ini. Akibatnya, suatu negara harus menetapkan regulasi yang ketat untuk mengola ekonominya. Salah satu cara yang efektif untuk mengontrol laju ekonomi adalah dengan menggunakan kebijakan pajak. Negara dapat menggunakan pemungutan pajak sebagai alat untuk mencapai berbagai tujuan ekonomi. Merka dapat mengumpulkan dana untuk melaksanakan kebijakan ekonomi yang diperlukan.

Indonesia adalah salah satu negara berkembang saat ini yang berusaha mencapai pemerataan pembangunan di seluruh daerah. Sebelum ini, pembangunan seringkali berkonsentrasi di kota – kota, meninggalkan wilayah pedesaan, terutama di daerah terpencil dan pedalaman. Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha untuk memastikan pembangunan merata di seluruh indonesia dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur sesuai dengan tujuan nasional.

Menurut (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2004) “Pendapatan Daerah Asli adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.” Pendapatan asli daerah ini berasal dari sumber

ekonomi lokal. Sumber pendapatan Asli Daerah terdiri dari empat jenis pemasukan: Pajak daerah, pengelolaan kekayaan yang terpisah, dan retribusi daerah. Ini juga termasuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan sah lainnya.

Pasal 1 Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib yang harus dibayar oleh individu atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan daerah dan kemakmuran rakyat (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2009). Pajak kendaraan bermotor (PKB) yang merupakan bagian dari pendapatan asli daerah dan digunakan untuk membiayai pembangunan di tingkat provinsi, adalah salah satu sumber pajak daerah. Pajak daerah berasal dari dua sumber, yaitu pajak daerah asli dan pajak pusat yang diberikan ke daerah sebagai pajak daerah. Kewajiban membayar pajak kendaraan semakin penting seiring dengan peningkatan tahunan jumlah kendaraan bermotor. Target pembangunan pemerintah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kewajiban pajak untuk membayar pajak kendaraan, baik pajak Surat Tanda Nomer Kendaraan (STNK) maupun pajak perpanjangan lima tahunan. Tetapi masih banyak masyarakat yang tidak membayar pajak kendaraan menunjukkan bahwa kepatuhan masih rendah. Jika mereka rajin dan patuh dalam membayar pajak mereka, tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Keterampilan ini sangat penting untuk mengurangi keterlambatan pembayaran dan membantu upaya pemerintah. Beberapa faktor yang

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak termasuk kurangnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran, serta fasilitas pembayaran yang tidak memadai atau terlalu jauh dari tempat tinggal.

Sistem Administasi Manunggal Satu Atap, juga disebut Samsat adalah lembaga pemerintah yang bertugas menyediakan layanan publik terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor. Samsat didirikan untuk membantu pemilik kendaraan mendapatkan layanan yang lebih mudah dan lebih cepat. Samsat adalah sistem kerja sama yang terdiri dari POLRI, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja. Berbagai kepengurusan pajak dilayani oleh Samsat, termasuk penerbitan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), TKB (Tanda Kendaraan Bermotor), PKB (Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor), BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), dan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) menurut (Kasmawati, 2018).

Kabupaten Majalengka di Jawa Barat terus berusaha meningkatkan pendapatannya melalui sektor pajak kendaraan bermotor. Jumlah wajib pajak meningkat seiring dengan peningkatan jumlah pemilik kendaraan bermotor. Namun, tingkat kepatuhan yang rendah dapat menyebabkan penerimaan pajak tidak meningkat atau bahkan cenderung menurun meskipun jumlah wajib pajak terus meningkat.

Fenomena terkait penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Majalengka menunjukkan adanya penurunan yang mengakibatkan tidak tercapainya target penerimaan pada tahun 2020 . Berdasarkan data dari Samsat, bahwa pajak kendaraan bermotor di

Kabupaten Majalengka biasanya terealisasi dengan baik, bahkan melampaui target yang ditetapkan. Namun, pada tahun 2020 target penerimaan pajak kendaraan bermotor hanya 73,36% yang tercapai, yang menunjukkan bahwa tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Majalengka telah menurun.

Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, pihak samsat menerapkan berbagai sistem pelayanan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan samsat, samsat telah memperkenalkan unit pelayanan samsat keliling (Samling) dan elektronik samsat (E-Samsat) sebagai tanggapan atas tuntutan masyarakat yang semakin meningkat terhadap layanan publik. Dengan inovasi ini, diharapkan wajib pajak akan merasakan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dalam proses pembayaran pajak. Karena mereka dapat menghemat waktu dan merasakan proses yang cepat, tepat, efektif, dan efisien, kepuasan wajib pajak akan meningkat (Wardani dan Rummiyatun, 2017).

Samsat keliling adalah layanan yang menyediakan pengesahan STNK tahunan, pembayaran PKB dan SWDKLLJ dengan metode jemput bola, yaitu dengan mengunjungi pemilik kendaraan atau wajib pajak yang jauh dari pusat pelayanan samsat. Tujuan dari inovasi ini adalah untuk mencapai visi dan misi yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat 2006 – 2010 melalui pengembangan teknologi informasi komunikasi. Samsat keliling (Samling) bertujuan untuk meningkatkan layanan publik, terutama dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). Layanan ini diharapkan dapat meningkatkan

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (BAPENDA JABAR, n.d.).

Salah satu inovasi baru yang dibuat oleh Kantor Samsat Jawa Barat adalah E-Samsat. E-Samsat menawarkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK melalui ATM bank yang berkolaborasi di seluruh Indonesia. Banyak kemudahan yang ditawarkan oleh inovasi ini, termasuk mengurangi kemudahan percaloan, mencegah penerimaan pajak yang tidak adil, menjamin perhitungan pajak yang tepat, dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak (BAPENDA JABAR, n.d.).

Sanksi perpajakan sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak berfungsi sebagai jaminan bahwa peraturan perundang – undangan perpajakan, juga dikenal sebagai norma perpajakan dipatuhi. Sanksi administrasi dan pidana adalah dua jenis sanksi yang ditemukan dalam peraturan pajak. Sanksi administrasi termasuk denda, bunga, dan kenaikan jika wajib pajak melanggar. Namun, Pelanggaran yang lebih serius melibatkan hukuman penjara (Savitri & Musfialdy, 2016). Sanksi pajak sangat penting untuk membuat wajib pajak merasa bertanggung jawab atas kewajiban perpajakannya dan merasa dirugikan jika mereka melanggar peraturan yang berlaku.

Kantor Samsat Majalengka menyediakan berbagai layanan unggulan untuk memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak tanpa harus pergi ke kantor Samsat, Kantor samsat Majalengka menawarkan banyak layanan, seperti:

1. Layanan Samsat Induk: Layanan samsat utama di kantor samsat untuk menangani berbagai kebutuhan terkait pajak kendaraan bermotor.
2. Layanan Samsat Ridethru: Layanan pembayaran pajak kendaraan yang memungkinkan wajib pajak membayartanpa turun dari kendaraan.
3. Layanan Samsat outlet: Titik – titik layanan yang tersebar untuk mempermudah akses pembayaran pajak kendaraan.
4. Layanan SAMADES (Samsat Masuk Desa): Layanan yang membawa pelayanan Samsat langsung ke desa – desa untuk wilayah terpencil.
5. Layanan SAMLING (Samsat Keliling): Unit pelayanan yang melakukan pengesahan dan pembayaran pajak kendaraan ke berbagai lokasi.
6. Layanan Samsat Rujak Limpung: Inisiatif untuk memburu pajak kendaraan dengan mendatangi kampung – kampung secara keliling.
7. Layanan SAMSAT KAWIN (Kawasan Industri): Layanan khusus yang ditujukan untuk kawasan industri guna memudahkan pengurusan pajak bagi perusahaan dan industri.

Dengan layanan ini, samsat majalengka berusaha untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut.

Tabel I.1 menunjukkan realisasi penerimaan pajak kendaraan di Kabupaten Majalengka dari tahun 2019 hingga 2023:

Tabel I.1
Realisasi penerimaan pajak kendaraan
di Kabupaten Majalengka Tahun 2019 – 2023

No	Tahun	Target	Realisasi	Kinerja (%)
1.	2019	Rp.111.472.000.000	Rp.113.583.899.100	101,89
2.	2020	Rp.146.837.804.000	Rp.107.713.956.600	73,36
3.	2021	Rp.110.774.622.000	Rp.112.923.373.100	101,94
4.	2022	Rp.120.314.447.412	Rp.125.227.231.800	104,08
5.	2023	Rp.126.687.853.430	Rp.129.385.029.600	102,13

Sumber: Samsat Majalengka

Berdasarkan Tabel I.1 terlihat realisasi penerimaan pajak kendaraan di Kabupaten Majalengka pada tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan kenaikan dan penurunan.

Melihat latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini mengangkat judul **“PENGARUH LAYANAN SAMSAT KELILING, LAYANAN E-SAMSAT, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi kasus di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat).”**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis dapat menguraikan rumusan masalah yang akan menjadi bahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Layanan Samsat keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah layanan Elektronik Samsat (E-Samsat) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah Layanan Samsat keliling, Layanan E-samsat, dan Sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah layanan samsat keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Majalengka.
2. Untuk mengetahui apakah layanan E-Samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Majalengka.
3. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik kendaraan bermotor di Kabupaten Majalengka.
4. Untuk mengetahui apakah layanan samsat keliling, E-samsat, dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik kendaraan bermotor di Kabupaten Majalengka.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi kantor Samsat

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk memaksimalkan tingkat pelayanan melalui inovasi layanan samsat keliling, E-Samsat, serta penerapan sanksi perpajakan. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan di Kabupaten Majalengka.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini membantu penulis memperoleh pengetahuan dan pemahaman baru serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Selain itu, penelitian ini diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Program studi Akuntansi perpajakan di Fakultas Ekonomi Universitas Mohammad Husni Thamrin.

3. Bagi Peneliti Lain

Penulis berharap temuan penelitian ini dapat memberikan ide dan perspektif yang bermanfaat sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya terutama dalam bidang Akuntansi Perpajakan.

4. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan penelitian ini akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban perpajakan yang terkait dengan kendaraan bermotor dan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan..

E. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran singkat tentang apa yang akan dibahas dalam penelitian ini, pembahasan disusun secara sistematis dalam setiap bab. Adapun untuk pembagian meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini membahas teori – teori yang relevan dengan topik penelitian dan mengacu pada sumber – sumber dan buku – buku yang relevan. Dan rangkuman tinjauan pustaka atau kerangka teori yang selanjutnya dikembangkan menjadi kerangka konsep atau kerangka pemikiran dimana pada kerangka pikiran menunjukkan bagaimana variabel penelitian berhubungan satu sama lain.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tempat dan waktu penelitian, metode yang digunakan, subjek penelitian, populasi penelitian, jumlah sampel yang diukur, dan instrumen penelitian yakni kuesioner.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil dari pengambilan dan analisis data penelitian serta membahas hasil pengolahan data penelitian dan pengujian hipotesis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyampaikant kesimpulan dari hasil penelitian yang dibahas di bab 4 dan memberikan rekomendasi untuk mendukung hal tersebut.